



Dinamika Ideologi Pendidikan Indonesia pada Masa Orde Baru hingga Kontemporer: Antara Perubahan dan Keberlanjutan

Mila Trisnawati,^{1*} Yulianti¹

¹Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, Indonesia

Email: mila.trisnawati.2207316@students.um.ac.id, yulianti.fis@um.ac.id

*Korespondensi

Article History: Received: 20-03-2026, Revised: 20-05-2026, Accepted: 24-05-2026, Published: 31-05-2026

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika ideologi pendidikan Orde Baru di Indonesia serta transformasinya dalam konteks liberalisasi pendidikan kontemporer. Berdasarkan metode kualitatif deskriptif melalui studi pustaka, penelitian ini menunjukkan bahwa rezim Orde Baru menjadikan pendidikan sebagai instrumen kontrol politik dan ideologis melalui sentralisasi kebijakan, penyeragaman kurikulum, serta penerapan nilai-nilai militeristik. Akibatnya berbagai bentuk resistensi muncul dari mahasiswa intelektual, lembaga keagamaan, komunitas seni, dan masyarakat sipil. Pada era pasca Orde Baru, pendidikan mengalami pergeseran menuju liberalisasi yang ditandai oleh privatisasi, komersialisasi, dan penetrasi ideologi neoliberalisme yang menekankan efisiensi, kompetisi, dan orientasi pasar. Penelitian ini berargumen bahwa ideologi baru tersebut kemudian bertransformasi melalui adanya manajerialisme kampus, marketisasi kurikulum, serta pengurangan peran negara, yang berdampak pada meningkatnya ketimpangan dan terkikisnya nilai humanistik dalam pendidikan. Namun demikian, resistensi dari berbagai kelompok menunjukkan adanya upaya untuk mempertahankan pendidikan sebagai hak publik dan ruang demokratis. Temuan penelitian ini menegaskan perlunya negosiasi kritis antara negara, pasar, dan masyarakat untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif, adil, dan berorientasi pada keadilan sosial.

Kata Kunci:

dinamika; liberalisasi; pendidikan

Abstract

This article aims to analyze the dynamics of the New Order's educational ideology in Indonesia and its transformation in the context of contemporary educational liberalization. Using a descriptive qualitative method based on a literature review, this study demonstrates that the New Order regime utilized education as an instrument of political and ideological control through policy centralization, curriculum standardization, and the implementation of militaristic values. Consequently, various forms of resistance emerged from intellectual students, religious institutions, the arts community, and civil society. In the post-New Order era, education underwent a shift toward liberalization marked by privatization, commercialization, and the penetration of neoliberal ideology, which emphasizes efficiency, competition, and market orientation. This study argues that this new ideology subsequently transformed through the emergence of campus managerialism, curriculum marketization, and the reduction of the state's role, which led to increased inequality and the erosion of humanistic values in education. Nevertheless, resistance from various groups indicates efforts to preserve education as a public right and a democratic space. The findings of this study underscore the need for critical negotiation among the state, the market, and society to realize an inclusive, equitable, and socially just education.

Keywords:

dynamics; education; liberalization



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Berperan sebagai pilar utama dalam memajukan sumber daya manusia di setiap bangsa, pendidikan memiliki urgensi yang penting untuk diselenggarakan. Secara umum, pendidikan merupakan proses pengembangan diri yang meliputi peningkatan kemampuan individu maupun kelompok untuk membentuk watak, karakter, serta memperkaya pengalaman hidup (Citriadin, 2019). Proses ini tidak hanya bersifat personal, tetapi juga kolektif, sehingga pendidikan menjadi pondasi penting untuk menghadapi berbagai tantangan zaman (Astuti, 2025; Amadi, 2023). Tantangan semacam ini salah satunya dapat disaksikan pada penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yang kerap kali mengalami dinamika karena menyesuaikan pemerintah yang silih berganti. Dimana dalam praktiknya pendidikan seringkali berinteraksi dengan kepentingan kekuasaan dan ideologi tertentu.

Ideologi dapat diartikan sebagai sebuah sistem keyakinan yang dijadikan landasan masyarakat untuk menata kehidupannya. Lebih lanjut, ideologi dijelaskan sebagai latar belakang sebuah kelompok sosial hadir dan memiliki nilai didalamnya. Dalam dunia pendidikan ideologi kemudian menjadi sangat menarik, dikarenakan landasan bukan lagi sebagai batas penataan ilmu pengetahuan tetapi turut berkontribusi dalam tatanan etika sosial (Syafii, 2018). Menurut William F. O'neil (2001) dalam Syafii (2018), ideologi pendidikan dibagi menjadi 2 aliran besar, yaitu Konservatif dan Liberal, sedangkan di Indonesia tidak secara utuh termasuk dalam salah satunya. Pendidikan di Indonesia sejatinya dirancang untuk melahirkan manusia yang merdeka jiwanya, namun tetap membumi pada etika dan kepribadian bangsanya (Noviani, 2017). Dalam praktiknya, dinamika tarik-menarik antara pelestarian nilai dan emansipasi sosial ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana rezim yang berkuasa menerjemahkan fungsi pendidikan demi mencapai stabilitas negara.

Secara umum, pendidikan Indonesia dijadikan sebagai landasan utama dalam mencapai tujuan nasional. Misalnya saja pada masa Orde Baru di Indonesia, penyelenggaraan pendidikan tidak hanya ditujukan sebagai sarana untuk pengembangan potensi, melainkan juga terintegrasi erat dengan pengaruh politik dan kebijakan pemerintah yang berorientasi pada pengendalian pembangunan nasional (Hasdiana et al., 2024). Secara tidak langsung membentuk bahwa, pendidikan masa Orde Baru memiliki peran ganda sebagai agen transformasi sosial maupun instrumen politik yang kemudian memunculkan pertanyaan terkait bagaimana karakteristik dan implementasi kebijakan pendidikan tersebut dalam konteks sejarah.

Periode Orde Baru sendiri berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998, ketika pemerintahan Orde Lama yang dipimpin Soekarno digantikan oleh Soeharto. Pemerintahan Orde Baru dikenal dengan sistem pemerintahan absolut dan otoriter, di mana pengambilan keputusan dilakukan tanpa melibatkan peran serta rakyat (Farchan, 2022). Pada masa ini, sistem pendidikan difungsikan sebagai instrumen strategis pemerintah untuk pembangunan nasional sekaligus pengendalian ideologi (Ramadhan et al., 2024). Sistem pendidikan yang tidak luput dari pengaruh tersebut menjadi pola sentralisasi yang ketat, hingga akhirnya berdampak negatif terhadap

kualitas pendidikan di Indonesia. Keadaan pendidikan yang sangat terpusat ini kemudian memicu kebutuhan akan transformasi besar menuju sistem pendidikan yang memberi ruang lebih luas bagi kebebasan dan desentralisasi dalam konteks pendidikan kontemporer.

Perubahan paradigma yang signifikan dalam pendidikan kontemporer menjadi salah satu bagian dalam transformasi pendidikan dari masa Orde Baru. Sistem pendidikan sentralistik dan otoriter sebagai alat pemerintahan masa Orde Baru, mulai beralih menjadi desentralisasi pada era berikutnya yaitu masa reformasi. Dimana paradigma pendidikan mulai bergeser dari orientasi kuantitas ke kualitas menuju kebebasan pendidikan. Liberalisasi dalam pendidikan mulai diberlakukan pada masa setelahnya yaitu masa pendidikan kontemporer, masa tersebut di Indonesia sering kali dikaitkan dengan dimulainya era reformasi setelah tahun 1998 hingga era digitalisasi pendidikan abad-21. Pada masa pendidikan kontemporer hadir pendidikan yang lebih membuka ruang berbagai keberagaman dan menyesuaikan perkembangan teknologi (Utami et al., 2024). Disamping menghadirkan perubahan, liberalisasi pendidikan kontemporer juga menunjukkan adanya indikasi keberulangan pola dari penyelenggaraan pendidikan era Orde Baru. Dinamika dalam dunia pendidikan kontemporer menimbulkan berbagai persoalan kompleks yang harus dihadapi oleh para pemangku kebijakan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

Salah satu faktor utama yang kerap menjadi kendala adalah dominasi kepentingan elit birokrasi yang sering kali mengedepankan agenda politiknya sendiri, terlepas dari urgensi peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan di Indonesia (Arifin & Akhiruddin, 2022). Situasi semacam ini menyebabkan perumusan dasar-dasar pendidikan tidak pernah lepas dari pengaruh politik kepemimpinan yang tengah berkuasa pada waktu itu, sehingga arah dan tujuan pendidikan nasional bersifat dinamis dan cenderung menyesuaikan diri dengan kepentingan penguasa. Sehingga, mengakibatkan birokrasi pendidikan kurang memberikan otonomi kepada pemerintahan daerah maupun satuan pendidikan dalam mengambil keputusan strategis, sehingga kualitas pelayanan pendidikan sering terhambat (Ndoluanak et al., 2023). Dengan demikian, liberalisasi pendidikan yang berkembang pada masa kontemporer yaitu masa pasca Orde Baru hingga saat ini menjadi landasan penting sekaligus tantangan baru dalam peralihan sistem pendidikan.

Penyusunan artikel ini tidak dapat dilakukan tanpa meninjau kajian terdahulu yang memiliki esensi serupa dengan penelitian ini, diantaranya dalam Ramadhan et al. (2024) dalam penelitiannya mengkaji mengenai dinamika kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru, penelitian tersebut dimaksudkan untuk mengungkap adanya dualisme dampak dari kebijakan pendidikan Orde Baru. Dimana di satu sisi kebijakan menunjukkan keberhasilan dalam pemerataan akses, tetapi di sisi lain menyoroti adanya kegagalan sistematis berupa sentralisasi kurikulum yang mengekang institusi pendidikan. Selanjutnya, dalam artikel ilmiah milik Edy Kisyanto (2025), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa perubahan kebijakan dari satu era ke era berikutnya bersifat reaktif terhadap dominasi politik. Serta dalam artikel milik Noviani et al. (2017) yang mengalihkan fokus pada relevansi pemikiran filosofis lokal dalam menghadapi tantangan zaman melalui teori pendidikan humanistik Ki Hajar Dewantara.

Berdasarkan tinjauan seluruh kajian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut mengkaji mengenai sejarah kebijakan pendidikan (Ramadhan et

al., 2024; Kisyanto, 2025) dan pendidikan humanistik dalam menghadapi tantangan zaman (Noviani et al., 2017) dan keduanya masih sebagai dua hal yang terpisah. Apabila disoroti pada era disrupsi teknologi saat ini dapat membawa resiko baru berupa komodifikasi dan mekanisasi manusia, di mana peserta didik sering kali direduksi hanya sebagai angka statistik atau komoditas siap pakai untuk pasar kerja. Gejala penyeragaman dan pragmatisme ini memiliki kemiripan pola dengan reduksi pendidikan di masa lalu, yang kemudian menjadi penting untuk dianalisis secara komprehensif.

Penelitian ini kemudian dibedah menggunakan dua perspektif teori, yaitu pedagogi kritis dan pendidikan humanistik. Mengacu pada pendapat Freire (2008) bahwa pedagogik kritis mengharapkan tidak adanya pemisahan antara guru dan siswa (Hendriani et al. (2018)). Teori ini mengusung praksis yang membebaskan manusia dari beragam dominasi terpusat dan doktrin daya pikir yang menjauhkan potensi peserta didik. Teori ini digunakan untuk memecahkan latar belakang terjadinya komodifikasi dan mekanisasi manusia yang menjadi resiko baru pada pendidikan kontemporer, serta membantu menganalisis indikasi keberlanjutan pola kontrol dalam bidang pendidikan. Selanjutnya dengan teori pendidikan humanistik, yang meletakkan manusia khususnya siswa sebagai fokus utama dalam pendidikan yang kepentingannya tidak akan dihilangkan karena perkembangan zaman (Noviani et al., 2017). Teori ini digunakan sebagai kerangka solusi perlawanan terhadap dehumanisasi yang kerap kali muncul pada pendidikan kontemporer, dan merekonstruksi arah pendidikan nasional dalam aspek kemanusiaan.

Dalam penyusunannya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkritisi bentuk transformasi menuju era kontemporer saat ini apakah benar-benar membawa perubahan ideologis yang emansipatif, atau justru merupakan keberlanjutan dari kontrol sentralistik gaya baru yang mendehumanisasi manusia, melalui tinjauan terhadap dinamika ideologi pendidikan masa Orde Baru, dan bentuk bentuk liberalisasi pendidikan kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini mendesak dilakukan sebagai intervensi teoritis agar transformasi pendidikan nasional tidak terjebak dalam dehumanisasi gaya baru, melainkan tetap berdiri kokoh di atas asas kemerdekaan belajar yang humanis.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*literature review*). Penggunaan metode tersebut dimaksudkan untuk menggali dan memahami dinamika ideologi pendidikan masa orde baru hingga kontemporer, begitu pula perubahan dan keberlanjutannya. Sedangkan, penggunaan studi pustaka dimaksudkan untuk mengumpulkan sumber data dengan jalan menelaah buku-buku, artikel jurnal, dan artikel media massa yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan, meliputi kebijakan pendidikan Orde Baru dan kontemporer, liberalisasi pendidikan kontemporer, dinamika ideologi pendidikan masa Orde Baru hingga kontemporer di Indonesia, bentuk-bentuk hegemoni dan resistensi pada masa Orde Baru dsb (Sari & Asmendri, 2020). Selanjutnya, analisis data berdasarkan sumber dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2022).

Tahap pertama yaitu reduksi data, pada tahap ini peneliti mengidentifikasi dan mengelompokkan data mentah ke dalam klaster-klaster tematik yang relevan dengan komparasi kebijakan pendidikan masa Orde Baru dan era kontemporer. Peneliti

memilah secara tajam dokumen-dokumen yang merekam mekanisme hegemoni kekuasaan di ranah sekolah, letupan resistensi yang muncul sebagai reaksi atas represi masa lalu, hingga fenomena liberalisasi serta komodifikasi pendidikan di era modern. Melalui penapisan yang kritis ini, informasi yang sifatnya sekadar tempelan atau tidak berkontribusi langsung pada substansi dapat disisihkan, sehingga fokus kajian menjadi lebih runcing dan terhindar dari risiko tumpang tindih data. Tahap kedua adalah penyajian data, pada tahap ini kumpulan informasi yang telah ditemukan sebelumnya tidak dibiarkan berdiri sendiri-sendiri, melainkan dirangkai secara saksama dalam bentuk narasi historis-kritis yang mengalir mengikuti kerangka konseptual penelitian. Melalui penyusunan yang sistematis dan terstruktur ini, peneliti mulai membaca dinamika yang tersirat di balik teks, mengurai pola-pola yang berulang, serta menangkap kecenderungan sosiologis-historis yang melatari setiap kebijakan. Proses penyajian ini sekaligus menjadi ruang krusial untuk mendeteksi kontradiksi yang barangkali muncul di antara regulasi resmi pemerintah dengan realitas empiris yang terekam dalam berbagai pustaka. Tahap ketiga berfokus pada penarikan kesimpulan awal yang berjalan simultan dengan proses verifikasi. Peneliti mulai menyusun makna dari fakta yang sudah disajikan sebelumnya untuk merumuskan jawaban atas persoalan ideologi pendidikan yang dikaji. Dengan tujuan kesimpulan ini tidak terjebak pada asumsi yang bias, langkah verifikasi dilakukan dengan cara menguji kembali konsistensi argumen secara mendalam. Peneliti mengkonfrontasi temuan sementara tersebut dengan berbagai perspektif teoretis yang mapan dalam literatur, melakukan validasi silang, hingga akhirnya mampu melahirkan konklusi final yang kokoh, objektif, serta menjawab tujuan penelitian secara utuh.

Hasil dan Pembahasan

Dinamika Ideologi Pendidikan Orde Baru

Masa Orde Baru Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto membawa corak baru pada kebijakan pendidikan nasional. Pada masa ini, terjadi perubahan paradigma yang signifikan, yaitu peralihan dari paham komunisme menuju penguatan Pancasila sebagai dasar dalam rencana pembangunan yang berkelanjutan. Pendidikan tidak lagi ditempatkan sebagai tujuan utama, melainkan difungsikan sebagai alat untuk mendukung perbaikan dan perkembangan ekonomi yang menjadi prioritas pemerintah, yang tersirat dalam rencana pembangunan lima tahun (REPELITA). Posisi yang sedemikian kembali diperkuat dengan perumusan kebijakan-kebijakan yang dijalankan melalui struktur administratif yang didominasi unsur militer (Hasdiana et al., 2024). Dominasi ini menyebabkan pemerintahan berjalan secara absolut dan otoriter, yang tercermin dari pembatasan kebebasan berpendapat serta pengaturan berbagai kepentingan oleh pemerintah tanpa pelibatan rakyat (Ramadhan et al., 2024). Kondisi tersebut menimbulkan dampak mendalam pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dinamika pendidikan serta sosial politik di Indonesia.

Dinamika bermula ketika orientasi pendidikan diarahkan untuk menunjang pembangunan nasional melalui penerapan sistem politik yang sangat sentralistik. Seluruh kebijakan pendidikan ditetapkan oleh pemerintah pusat, sedangkan sekolah hanya bertugas melaksanakan proses pembelajaran sesuai arahan tersebut (Loppies, 2023). Pendekatan ini mendorong penyeragaman cara berpikir dan bertindak sehingga pembangunan pendidikan lebih menitikberatkan kuantitas dibandingkan

kualitas. Contohnya adalah Inpres No. 10 Tahun 1978, yang bertujuan menyamakan pemahaman tentang Pancasila serta membentuk “Manusia Pancasila” di seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pelajar hingga pegawai pemerintah. Sebagai pelaksanaannya, diperkenalkan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang dikenal dengan P4, serta mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Hal ini menegaskan bahwa pendidikan Orde Baru berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Akan tetapi, penerapan PMP justru menanamkan sikap taat mutlak kepada negara tanpa memperhatikan hak individu, sehingga menghasilkan pribadi yang cenderung apatis, penakut, dan sangat patuh kepada kekuasaan (Agista, 2023). Selanjutnya, ketika Nugroho Notosusanto menjabat sebagai Menteri Pendidikan (1983–1985), muncul mata pelajaran Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) yang menonjolkan peran Angkatan Darat dalam menghadapi PKI 1965–1966. Penyisipan materi ini semakin memperkuat unsur politis dalam kurikulum pendidikan, karena menurut Notosusanto, pengajaran tersebut bertujuan menguatkan jiwa, semangat, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 pada generasi muda (Loppies, 2023).

Penyeragaman pendidikan tidak berhenti sampai di situ. Pemerintah juga memberlakukan kebijakan wajib belajar sekolah dasar guna memperluas pemerataan pendidikan. Awalnya, program wajib belajar yang ditetapkan berdurasi 9 tahun, namun karena pelaksanaannya menemui banyak kendala, kemudian diubah menjadi wajib belajar 6 tahun. Program ini berhasil diterapkan selama kurang lebih satu dekade sebelum pemerintah kembali berniat memberlakukan wajib belajar 9 tahun. Pada 2 Mei 1994, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, Presiden Soeharto secara resmi memberlakukan kembali wajib belajar 9 tahun yang diperkuat dengan keluarnya Inpres No. 1 Tahun 1994 (Loppies, 2023). Di samping itu, sistem pendidikan pada masa Orde Baru terbagi menjadi dua jalur utama, yaitu pendidikan umum dan pendidikan khusus. Pendidikan umum mencakup jenjang formal dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan khusus fokus pada pendidikan kejuruan yang disiapkan untuk memasuki dunia kerja. Pendidikan kejuruan ini berlangsung mulai tingkat menengah hingga tinggi dengan orientasi pada bidang teknologi, industri, perdagangan, pertanian, kerumahtanggaan, dan pelayanan jasa (Septian dan Ahmad, 2020).

Kontrol ketat juga diterapkan dalam berbagai aspek pendidikan sebagai bagian dari strategi penguatan pengaruh negara. Contohnya adalah penunjukan kepala sekolah yang loyal kepada rezim dan penyensoran buku teks, yang dilakukan agar materi pembelajaran tetap sesuai dengan ideologi pemerintah (Muhajirin, 2024). Pendekatan serupa juga diterapkan dalam pendidikan keagamaan, di mana madrasah diawasi dan diarahkan agar selaras dengan ideologi nasional serta menjaga stabilitas sosial-politik (Loppies, 2023). Sistem pendidikan saat itu sangat dipengaruhi nuansa militerisme yang kuat. Pada semua jenjang, mulai dari dasar hingga menengah dan atas, nilai-nilai militer seperti kewajiban baris-berbaris serta pemberian hukuman fisik terhadap siswa yang melanggar aturan diterapkan secara rutin. Selain itu, di perguruan tinggi keberadaan resimen mahasiswa (menwa) menjadi gambaran nyata pengaruh militer dalam sistem pendidikan nasional (Kurniawan et al., 2025). Secara keseluruhan, kebijakan, kurikulum, dan segala pelaksanaan pendidikan pada masa Orde Baru mencerminkan pola serta ciri khas yang melekat pada pemerintahan saat itu.

Hegemoni yang tercipta tidak berjalan tanpa adanya resistensi. Perlawanan muncul dalam berbagai bentuk sebagai upaya counter-hegemony oleh masyarakat

sipil. Resistensi intelektual berkembang melalui kegiatan akademik non formal seperti kelompok studi, diskusi terbatas, dan penerbitan jurnal bawah tanah yang memfasilitasi penyebaran pengetahuan alternatif (Ramadhan et al., 2024). Di sisi lain, mahasiswa melakukan perlawanan melalui pengorganisasian aksi bawah tanah pasca kebijakan NKK/BKK, dengan aktivitas seperti diskusi kos, kajian sosial-politik, dan gerakan solidaritas yang justru memperkuat jaringan gerakan yang lebih adaptif (Kusmawati et al., 2023). Selain itu, resistensi kultural hadir melalui seni, teater, dan sastra yang menyuarakan kritik terhadap otoritarianisme, serta menjadi ruang pendidikan alternatif di luar kurikulum formal (Ramadhan et al., 2024). Perlawanan juga dilakukan oleh lembaga non-negara seperti organisasi Islam, pesantren, dan LSM yang mempertahankan nilai dan kurikulum independen, serta mengembangkan pendidikan kritis berbasis masyarakat (Adiyono & Abdurrohm, 2024). Dalam pendidikan sejarah, resistensi tampak pada praktik pedagogis guru yang menggunakan sumber non-resmi dan sejarah lokal untuk menyeimbangkan narasi negara, seperti yang masih ditemukan di sekolah-sekolah di Cirebon (Syadiyah, 2024). Hal ini menegaskan bahwa hegemoni pendidikan Orde Baru tidak hanya menjadi fenomena historis, tetapi juga meninggalkan jejak yang bertahan hingga kini, sekaligus menunjukkan bahwa pendidikan selalu menjadi arena kontestasi antara negara dan masyarakat dalam membentuk kesadaran kritis.

Liberalisasi Pendidikan Kontemporer

Pendidikan liberal dalam konteks era kontemporer tidak dapat dilepaskan dari keragaman basis pemikiran yang membentuk dan memengaruhi arah perkembangannya, baik yang bersumber dari tradisi filsafat klasik, pendekatan ilmiah modern, pertimbangan etika sosial, maupun dinamika politik global yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Keragaman sumber pemikiran tersebut menyebabkan liberalisme pendidikan tidak tampil sebagai konsep yang tunggal, mapan, dan sepenuhnya seragam, melainkan hadir sebagai rangkaian gagasan yang bersifat ambigu, dinamis, dan sering kali mengandung ketegangan internal antar nilai, prinsip, dan orientasi yang saling bersaing satu sama lain. Kondisi tersebut muncul karena liberalisme pada dasarnya berupaya menempatkan kebebasan individu sebagai nilai utama dan fondasi utama dalam proses pendidikan, sementara pada saat yang sama tetap harus berhadapan dengan tuntutan sosial, moral, budaya, agama, dan kepentingan kolektif masyarakat yang sangat beragam dan tidak selalu sejalan dengan prinsip kebebasan individu tersebut (Asnawan et al., 2022). Dengan demikian, liberalisasi pendidikan dapat dipahami sebagai refleksi dari dinamika pemikiran modern yang terus bergerak dan bernegosiasi antara tuntutan kebebasan individu dengan keberadaan batasan nilai, norma sosial, serta tanggung jawab kolektif yang hidup di tengah masyarakat kontemporer.

Liberalisasi pendidikan kontemporer di Indonesia menandai terjadinya transformasi besar dalam sistem pendidikan nasional, yaitu perubahan dari pendidikan sebagai instrumen pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan sosial menuju pendidikan yang semakin dipengaruhi oleh logika pasar, mekanisme kompetisi ekonomi, dan praktik komodifikasi pengetahuan, terutama setelah runtuhnya rezim Orde Baru dan terbukanya ruang reformasi politik serta ekonomi nasional. Perubahan tersebut tampak secara nyata melalui meningkatnya privatisasi lembaga pendidikan, berkembangnya institusi pendidikan berbasis korporasi, serta

meluasnya komersialisasi layanan pendidikan di berbagai jenjang, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi (Salim et al., 2024).

Di samping itu, liberalisasi pendidikan juga ditandai oleh semakin kuatnya orientasi human capital yang memandang pendidikan sebagai investasi ekonomi untuk menghasilkan tenaga kerja produktif dan kompetitif di pasar global, serta penerapan standar internasional seperti akreditasi global, benchmarking mutu pendidikan, sertifikasi kompetensi, dan pengukuran berbasis indikator kuantitatif yang dianggap mampu meningkatkan daya saing institusi pendidikan Indonesia di tingkat internasional (Gani et al., 2022). Dalam kerangka ekonomi politik, pendidikan kemudian tidak lagi dipahami semata-mata sebagai sarana pembentukan warga negara yang kritis, demokratis, dan berkeadaban, tetapi juga diposisikan sebagai komoditas ekonomi yang memiliki nilai tukar dalam pasar tenaga kerja dan industri pengetahuan global, sebagaimana dicatat dalam berbagai analisis mengenai kapitalisme pendidikan di Indonesia (Nur, 2022).

Salah satu karakter utama liberalisasi pendidikan adalah meningkatnya peran aktor non-negara, seperti korporasi pendidikan, yayasan swasta, lembaga donor internasional, hingga platform pendidikan digital berbasis teknologi, yang secara perlahan menggeser orientasi pendidikan dari kepentingan kolektif menuju persaingan individual yang semakin kompetitif. Fenomena ini memperkuat logika neoliberalisme dalam dunia pendidikan, yaitu keyakinan bahwa kualitas pendidikan terutama ditentukan oleh kemampuan individu maupun institusi untuk bersaing secara bebas dalam mekanisme pasar yang kompetitif dan terbuka (Djamhuri & Ekowati, 2024). Dalam praktiknya, sekolah dan perguruan tinggi didorong untuk berlomba memperoleh reputasi, akreditasi, serta pengakuan publik melalui capaian angka mutu, produktivitas akademik, publikasi ilmiah, dan sertifikasi tertentu yang sering kali dijadikan ukuran utama keberhasilan pendidikan. Tekanan untuk mencapai berbagai target administratif dan indikator performatif tersebut berpotensi menyempitkan makna pendidikan sebagai proyek sosial, humanis, dan emansipatoris, sehingga dimensi kritis, reflektif, dan kolektif dalam pendidikan semakin terpinggirkan oleh tuntutan efisiensi, produktivitas, dan orientasi pasar yang dominan (Rakhmani, 2024).

Liberalisasi pendidikan juga membawa tantangan serius terhadap prinsip keadilan sosial dalam akses dan kualitas pendidikan. Meningkatnya biaya pendidikan, mahalnya akses terhadap fasilitas pembelajaran modern, serta ketimpangan infrastruktur pendidikan antara wilayah urban dan rural semakin memperkuat stratifikasi sosial di masyarakat dan menjadikan pendidikan sebagai ruang reproduksi kelas sosial yang sulit dijangkau oleh kelompok ekonomi lemah (Sari et al., 2025). Ketimpangan tersebut terlihat dalam perbedaan kualitas sekolah, akses terhadap teknologi digital, kualitas tenaga pengajar, serta kesempatan memperoleh pendidikan tinggi yang lebih baik antara masyarakat perkotaan dan masyarakat di daerah terpencil.

Di tingkat perguruan tinggi, pasar pendidikan menciptakan ketidaksetaraan akses yang signifikan karena institusi pendidikan cenderung menetapkan biaya tinggi demi menjaga daya saing dan kualitas layanan, sehingga kelompok masyarakat miskin mengalami hambatan besar untuk memperoleh pendidikan berkualitas (Esmati et al., 2024). Selain itu, negara dalam sistem pendidikan neoliberal semakin mengambil posisi sebagai regulator dan pengawas kebijakan, bukan lagi sebagai penyedia utama layanan pendidikan publik secara penuh, sehingga porsi swasta

dalam pembiayaan pendidikan terus meningkat dan memperbesar ketergantungan masyarakat terhadap mekanisme pasar pendidikan (Maulana & Indriati, 2022).

Dalam konteks munculnya ideologi baru di era globalisasi, masuknya nilai-nilai global seperti meritokrasi, kompetisi, efisiensi administratif, standardisasi mutu, dan orientasi produktivitas ekonomi tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang sepenuhnya netral atau bebas kepentingan. Nilai-nilai tersebut secara perlahan membentuk habitus baru dalam dunia pendidikan yang lebih menekankan capaian individual, kemampuan teknis, dan efisiensi kerja, sementara dimensi historis, kebudayaan lokal, identitas kolektif, dan nilai-nilai kemanusiaan cenderung diabaikan atau dianggap kurang relevan dalam kerangka pembangunan ekonomi modern (Rakhmani, 2024). Kurikulum pendidikan kemudian semakin diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dan industri global melalui pendekatan link and match, orientasi vokasional, serta penguatan keterampilan praktis yang dianggap sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Akibatnya, disiplin ilmu humaniora, filsafat, seni, dan ruang-ruang kritis dalam pendidikan mengalami marginalisasi karena dianggap kurang produktif secara ekonomi dibandingkan bidang-bidang yang berorientasi teknokratis dan industri (Gani et al., 2022).

Di sisi lain, liberalisasi pendidikan juga memunculkan berbagai bentuk resistensi dan gerakan kritik dari beragam kelompok masyarakat sipil. Akademisi, guru, aktivis pendidikan, organisasi non-pemerintah, hingga komunitas pendidikan alternatif mulai memperjuangkan konsep pendidikan yang lebih inklusif, adil, demokratis, dan humanis sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi logika pasar dalam sistem pendidikan nasional. Berbagai kritik muncul terhadap komersialisasi kampus, tingginya biaya pendidikan, eksploitasi tenaga pendidik, serta ketimpangan akses digital yang semakin memperlebar jurang pendidikan antara kelompok kaya dan miskin (Salim et al., 2024).

Kebijakan seperti Merdeka Belajar juga dipahami sebagai arena pertarungan ideologis antara logika pasar yang menekankan fleksibilitas, kompetisi, dan efisiensi dengan idealisme pendidikan publik yang mengutamakan kesetaraan, pembentukan karakter, dan kebermaknaan proses belajar bagi seluruh warga negara (Rakhmani, 2024). Oleh karena itu, masa depan pendidikan Indonesia sangat bergantung pada bagaimana negara, pasar, dan masyarakat sipil terus menegosiasikan arah serta orientasi pendidikan nasional, apakah dominasi neoliberalisme akan semakin menguat melalui mekanisme pasar yang kompetitif, atau justru akan muncul model pendidikan baru yang lebih demokratis, partisipatif, inklusif, dan berkeadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Perubahan dan Keberlanjutan Ideologi Pendidikan Orde Baru dalam Pendidikan Kontemporer

Liberalisasi pendidikan kontemporer di Indonesia menunjukkan adanya dinamika ideologi yang sebenarnya masih memiliki keterkaitan kuat dengan pola kekuasaan pada masa Orde Baru. Meskipun sistem politik telah berubah dari rezim otoriter menuju era reformasi yang lebih demokratis, pendidikan tetap menjadi ruang strategis yang digunakan untuk mengatur arah masyarakat dan membentuk cara berpikir warga negara. Pada masa Orde Baru, pendidikan dijadikan alat legitimasi kekuasaan negara melalui penanaman ideologi Pancasila secara terpusat dan wajib di seluruh jenjang pendidikan. Kurikulum disusun secara seragam oleh negara dan

digunakan untuk mempertahankan stabilitas politik serta memperkuat kekuasaan Soeharto melalui pembentukan kepatuhan sosial dan kontrol terhadap pemikiran masyarakat (Ramadhan et al., 2024). Dalam situasi tersebut, sekolah dan perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga menjadi instrumen politik yang menanamkan loyalitas terhadap negara dan membatasi berkembangnya sikap kritis di kalangan peserta didik maupun akademisi.

Memasuki era kontemporer, bentuk kontrol terhadap pendidikan memang mengalami perubahan, tetapi substansi pengaruh ideologinya masih terus berlanjut. Jika pada masa Orde Baru kontrol dilakukan secara langsung melalui sentralisasi negara dan indoktrinasi ideologi, maka dalam era neoliberalisme kontrol bergerak melalui mekanisme pasar, privatisasi, dan komersialisasi pendidikan. Pendidikan mulai dipandang sebagai komoditas ekonomi yang dapat diperjualbelikan dan diukur berdasarkan nilai pasar. Dampaknya terlihat dari meningkatnya jumlah institusi pendidikan swasta, mahalannya biaya pendidikan, serta semakin melebarnya ketimpangan akses pendidikan antara kelompok masyarakat yang mampu secara ekonomi dan kelompok masyarakat miskin atau yang tinggal di wilayah terpencil (Prasetyo, 2024). Dalam kondisi seperti ini, kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh hak sebagai warga negara, tetapi sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi masing-masing individu atau keluarga.

Keberlanjutan ideologi tersebut juga tampak dalam perubahan budaya pengelolaan kampus dan institusi pendidikan. Jika sebelumnya negara menggunakan pendekatan indoktrinasi politik secara langsung, maka pada era sekarang perguruan tinggi lebih diarahkan pada sistem manajerialisme yang menekankan efisiensi, produktivitas, audit, dan akuntabilitas berbasis angka. Universitas didorong untuk beroperasi layaknya perusahaan yang harus mampu bersaing, menghasilkan keuntungan, dan menunjukkan performa melalui indikator kuantitatif seperti jumlah publikasi, akreditasi, sertifikasi, hingga peringkat global. Bahasa pendidikan kemudian semakin dipenuhi istilah-istilah ekonomi dan akuntansi, di mana keberhasilan lembaga pendidikan diukur melalui capaian administratif dan produktivitas institusional (Djamhuri & Ekowati, 2023). Situasi ini secara perlahan mengubah orientasi akademik yang sebelumnya menekankan pengembangan ilmu pengetahuan, pembentukan karakter, dan penguatan nilai kemanusiaan menjadi penyedia jasa pendidikan yang berorientasi pada keuntungan dan daya saing global seperti model korporasi internasional (Buduhartono et al., 2025).

Perubahan paradigma dari era Orde Baru menuju pendidikan neoliberal juga terlihat dalam transformasi kurikulum. Pada masa Orde Baru, kurikulum dirancang untuk memperkuat identitas nasional dan loyalitas terhadap negara melalui pendidikan moral Pancasila dan narasi pembangunan nasional. Sementara itu, pada era kontemporer, orientasi kurikulum lebih diarahkan pada kebutuhan pasar tenaga kerja global. Sekolah dan perguruan tinggi didorong untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan industri melalui program vokasional, sertifikasi kompetensi, pelatihan keterampilan kerja, dan kerja sama antara dunia pendidikan dengan sektor industri (Suparyati & Habsya, 2024). Akibatnya, pendidikan semakin menekankan aspek pragmatis dan utilitarian, yaitu bagaimana lulusan dapat cepat terserap dalam dunia kerja dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, bidang humaniora, filsafat, seni, dan ilmu-ilmu sosial kritis mulai mengalami marginalisasi karena dianggap kurang relevan dengan kebutuhan pasar kerja modern. Standar

internasional seperti akreditasi global, benchmarking kampus, serta sistem evaluasi berbasis kompetensi turut memperkuat budaya efisiensi dan persaingan di dunia pendidikan (Irma, 2025).

Transformasi tersebut menyebabkan penyempitan makna pendidikan dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan tidak lagi dipahami secara luas sebagai proses pembentukan manusia yang kritis, beretika, dan memiliki kesadaran sosial, tetapi semakin dipersempit menjadi sarana untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan daya saing individu di pasar kerja. Dalam kerangka neoliberalisme, keberhasilan pendidikan seringkali diukur berdasarkan kemampuan menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan siap pakai, bukan berdasarkan kontribusinya terhadap pembangunan demokrasi, kesadaran sosial, atau penguatan nilai-nilai kemanusiaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa neoliberalisme telah menggeser orientasi pendidikan menuju fungsi yang lebih utilitarian dan ekonomis, sehingga pendidikan perlahan menjauh dari misi humanis dan sosial yang seharusnya menjadi fondasi utama pendidikan publik (Indriaty et al., 2025). Dalam beberapa hal, pola ini memiliki kemiripan dengan hegemoni pendidikan pada masa Orde Baru yang sama-sama menempatkan pendidikan sebagai alat untuk mendukung agenda pembangunan tertentu, meskipun dengan bentuk dan pendekatan yang berbeda.

Kerangka neoliberalisme dalam pendidikan juga mendorong perubahan besar terhadap posisi negara. Negara tidak lagi berperan dominan sebagai penyedia utama layanan pendidikan publik, melainkan lebih berfungsi sebagai regulator yang mengatur kebijakan dan standar pendidikan. Kebijakan deregulasi dan desentralisasi pembiayaan pendidikan membuat sebagian besar tanggung jawab pendidikan dialihkan kepada masyarakat, keluarga, dan sektor swasta (Hayida-o et al., 2025). Dalam praktiknya, hal ini menyebabkan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap lembaga pendidikan swasta dan pembiayaan mandiri. Pendidikan kemudian tidak lagi dipahami sepenuhnya sebagai hak dasar warga negara yang wajib dijamin negara, tetapi berubah menjadi tanggung jawab individual yang harus diperjuangkan melalui kemampuan ekonomi masing-masing. Situasi ini memperkuat stratifikasi sosial karena kelompok masyarakat yang memiliki sumber daya ekonomi lebih besar akan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik dibandingkan kelompok masyarakat miskin.

Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa neoliberalisme dalam pendidikan justru memperdalam kesenjangan sosial di Indonesia. Komersialisasi pendidikan dan perubahan peran negara menjadi regulator memberi peluang besar bagi institusi swasta untuk menentukan kualitas dan akses pendidikan berdasarkan logika pasar. Akibatnya, pendidikan menjadi semakin eksklusif dan sulit dijangkau oleh masyarakat kelas bawah. Ketimpangan fasilitas pendidikan, kualitas tenaga pengajar, akses teknologi, hingga kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi semakin memperlihatkan adanya jarak sosial antara kelompok kaya dan kelompok miskin (Prasetyo, 2024). Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas sosial, tetapi juga menjadi mekanisme reproduksi kelas sosial yang mempertahankan ketimpangan antar kelompok masyarakat. Anak-anak dari keluarga mapan memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pendidikan berkualitas dan posisi sosial yang lebih tinggi, sedangkan kelompok masyarakat miskin seringkali terjebak dalam keterbatasan akses pendidikan yang memengaruhi masa depan mereka.

Keberlanjutan ideologi neoliberal dalam pendidikan juga memunculkan berbagai bentuk resistensi akademik dan sosial. Banyak akademisi, guru, aktivis pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas pendidikan alternatif mulai mengkritik komersialisasi kampus dan dominasi pasar dalam dunia pendidikan. Kritik tersebut muncul karena pendidikan dipandang semakin kehilangan orientasi sosial dan kemanusiaannya. Gerakan pendidikan inklusif, pendidikan berbasis komunitas, serta dorongan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai humanistik menjadi bentuk perlawanan terhadap dominasi neoliberalisme dalam sistem pendidikan nasional. Upaya ini terlihat dalam tuntutan agar kurikulum lebih berpihak pada keadilan sosial, penguatan budaya lokal, dan pengembangan kesadaran kritis peserta didik, bukan sekadar memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja (Indriaty et al., 2025).

Dalam konteks tersebut, masyarakat mulai menyadari bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya diarahkan untuk mencetak tenaga kerja produktif, tetapi juga membentuk manusia yang memiliki empati sosial, kesadaran demokratis, dan kemampuan berpikir kritis terhadap realitas sosial di sekitarnya. Oleh karena itu, berbagai kelompok masyarakat menuntut agar pendidikan kembali ditempatkan sebagai ruang publik yang demokratis dan dapat diakses secara adil oleh seluruh warga negara tanpa dibatasi oleh kemampuan ekonomi. Dinamika ini menunjukkan bahwa ideologi pendidikan pada masa Orde Baru sebenarnya tidak sepenuhnya hilang setelah reformasi, melainkan mengalami transformasi dan berevolusi menjadi bentuk neoliberalisme pendidikan yang bekerja melalui mekanisme pasar dan logika ekonomi. Karena itu, diperlukan respons kritis dari negara, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa pendidikan tetap menjadi hak demokratis yang berorientasi pada keadilan sosial, pengembangan manusia, dan kepentingan publik secara luas.

Kesimpulan

Transformasi pendidikan di Indonesia menunjukkan pergeseran pola dominasi dari kontrol ideologis negara pada masa Orde Baru menuju penetrasi logika pasar pada era kontemporer. Pada fase Orde Baru, pendidikan dikonstruksi sebagai instrumen legitimasi kekuasaan melalui sentralisasi kebijakan, standarisasi kurikulum, dan pembatasan ruang kritis. Adapun pada konteks kekinian, liberalisasi pendidikan menghadirkan bentuk dominasi baru melalui komersialisasi, privatisasi, serta penguatan orientasi kompetitif yang berdampak pada ketimpangan akses dan pergeseran fungsi pendidikan dari ruang pembentukan kesadaran kritis menjadi mekanisme penyediaan tenaga kerja. Meskipun demikian, temuan juga menunjukkan bahwa praktik resistensi tetap hadir sebagai bagian dari dinamika pendidikan, baik dalam bentuk gerakan intelektual, inisiatif masyarakat sipil, maupun praktik pendidikan alternatif. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan penguatan peran negara dalam memastikan kebijakan pendidikan yang berorientasi pada keadilan sosial dan aksesibilitas yang inklusif, serta komitmen institusi pendidikan untuk mengembangkan nilai-nilai kritis dan humanistik. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara lebih empiris bentuk-bentuk resistensi dan model pendidikan alternatif yang berpotensi menjadi strategi transformasi pendidikan yang lebih demokratis.

Referensi

- Adiyono, A., & Abdurrohim, A. (2024). Resistance and Resillience in Changing Indonesia: The Political Struggle and Movement of Hidayatullah. *Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 19(1), 91-116. <https://doi.org/10.21274/epis.2024.19.01.91-116>.
- Agista, A. (2023). Transformasi Penataran P4 Masa Orde Baru ke dalam Kurikulum Merdeka: Tinjauan terhadap Implementasi P5 dalam Pendidikan Nasional. *JAGADDHITA: Jurnal Kebhinekaan dan Wawasan Kebangsaan*, 3(1), 1-10. <https://journal.unindra.ac.id/index.php/jagaddhita/article/view/2281>.
- Amadi, A. S. M. (2022). Pendidikan di Era Global: Persiapan Siswa untuk Menghadapi Dunia yang Semakin Kompetitif. *Educatio: Jurnal Ilmu Kependidikan*, 17(2), 153-164. <https://doi.org/10.29408/edc.v17i2.9439>.
- Arifin, M., & Akhiruddin, F. (2022). Permasalahan Dalam Reformasi Birokrasi Dalam Sektor Pendidikan. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16(3), 1049-1064. [10.35931/aq.v16i3.981](https://doi.org/10.35931/aq.v16i3.981)
- Asnawan., Basith, A., & Ratnasari, K. (2022). Dinamika Pendidikan Islam dan Liberalisasi Pendidikan di Indonesia. *Attanwir: Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan*, 13(2), 185-196. <http://e-jurnal.staiattanwir.ac.id/index.php/attanwir/article/view/247>.
- Astuti, A. D. (2025). Sosialisasi Pentingnya Pendidikan dalam Menghadapi Tantangan Global. *Bijaksana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 6-9. <https://doi.org/10.33084/bijaksana.v3i1.10060>.
- Budihartono., Usman, S., & Damopolii, M. (2025). Komersialisasi Pendidikan dalam Perspektif Pendidikan Islam. *ORIENT: Journal of Islamic Studies & Culture*, 1(2), 11-17. <https://ejournal.kabarmoe.com/index.php/orient/article/view/43>.
- Citriadin, Y. (2019). *Pengantar Pendidikan*. CV Sanabil.
- Djamhuri, A., & Ekowati, W. H. (2023). Exploring Indonesian Higher Education Neoliberalization: A Discourse on the Role of Accounting. *JIA: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 258-286. <https://doi.org/10.23887/jia.v8i1.63508>.
- Esmati, S., emynorane, R. H., & Arrive, J. T. (2024). The Neoliberal Political Economy of Higher Education: Marketization and its Impact on Access and Quality at Universitas Hasanuddin. *JoGaPa: Journal of Governance and Public Administration*, 2(1), 175-184. [10.70248/jogapa.v2i1.1688](https://doi.org/10.70248/jogapa.v2i1.1688).
- Farchan, Y. (2022). Dinamika Sistem Politik Otoritarianisme Orde baru. *Jurnal Adhikari*, 1(3), 152-161. <https://doi.org/10.53968/ja.v1i3.41>.
- Gani, A. W., Malliongi, M. T., & Zainuddin, M. S. (2022). Neoliberalism and Higher Education in Indonesia (Re-Scrutinizing the Policy of the Independent Campus). In *Seminar Nasional Hasil Penelitian* (pp. 1412-1423). Universitas Negeri Makassar.
- Hasdiana, S., Alamsyah, N., US, K. A., & Sya'roni, S. (2024). Kebijakan Pendidikan Pemerintah Indonesia Era Orde Baru Serta Pengaruhnya terhadap Pendidikan

- Islam di Indonesia. *ALFIHRIS: Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 2(4), 14-27. <https://doi.org/10.59246/alfihris.v2i3.950>
- Hayida-o, S., Siradjuddin, S., & Wayong, M. (2025). Perbandingan Sistem dan Efektivitas Pembiayaan Pendidikan Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(3), 4312-4323. <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/563>.
- Hendriani, A., Nuryani, P., & Ibrahim, T., (2018). Pedagogik Literasi Kritis; Sejarah, Filsafat dan Perkembangan di Dunia Pendidikan. *Pedagogia: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 16(1). <https://doi.org/10.17509/pgdia.v16i1.10811>.
- Indriaty, D., Astriani, D., Sabrifha, E., & Aqilla, L. (2025). Strategi kebijakan pendidikan dalam menghadapi ketimpangan sosial dan budaya. *PEMA: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 551-565. <https://doi.org/10.56832/pema.v5i2.1258>.
- Irma, D. (2025). Peran Akreditasi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Tinggi: Kajian Kebijakan di Indonesia. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(3), 513-520. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i3.1264>.
- Kurniawan, D. A., Putri, A. D. W., & Pratama, Y. Y. (2025). Kebijakan Kontroversial Pemerintah Orde Baru di Ranah Pendidikan Tinggi Indonesia dalam Perspektif Historis. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 29-42. <https://doi.org/10.30743/mkd.v9i1.10380>.
- Kusmawati, H., Nurona, A. L., Maulana, I., Khasanah, R., & Dewi, R. A. (2023). Perkembangan Pendidikan Indonesia Setelah Tahun 1965 sampai Runtuhnya Orde Baru. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(9), 4054-4062. <https://doi.org/10.56799/jim.v2i9.2098>.
- Loppies, M. (2023). Pendidikan Zaman Orde Baru: Upaya Melanggengkan Kekuasaan Soeharto. *Phinisi Integration Review*, 6(2), 237-245. <https://doi.org/10.26858/pir.v6i2.47116>.
- Maulana, A., & Indriati, F. (2022). Kebijakan Privatisasi Pendidikan sebagai Dampak dari Globalisasi. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 155-170. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i1.2601>.
- Muhajirin, M. (2024). Kebijakan Pendidikan di Masa Orde Baru. *INNOVATIVE: Jurnal of Social Science Research*, 4(4), 3853-3864. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/13539>.
- Ndoluanak, Y. H., Tjalla, A., & Sarifah, I. (2023). Pengaruh Politik Arah Perkembangan Suatu Bangsa (Kekuasaan) Terhadap Konstruksi Pendidikan. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 6(4), 2467-1471. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/21176>.
- Noviani, Y., Rajab, R. M., & Hashifah, A. N. (2017, May). Pendidikan humanistik ki hadjar dewantara dalam konteks pendidikan kontemporer di indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP* (Vol. 1, No. 2). Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

- Nur, A. (2022). Kapitalisme Pendidikan dan Reiventing Paradigma Pendidikan Indonesia: Sebuah Tinjauan Antropologi Pendidikan. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 3(1), 69-84. <https://doi.org/10.55623/au.v3i1.94>.
- Prasetyo, K. (2024). Hegemoni Neoliberalisme Pendidikan Tinggi di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis. *LANGGAS: Jurnal Studi Pembagunan*, 3(1), 1-11. <https://doi.org/10.32734/ljsp.v3i1.15810>.
- Rakhmani, I. (2024). "Merdeka Belajar": A Cultural Political Economy of Indonesia's Neoliberalising Nationalist University. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 29(1), 1-25. 10.7454/MJS.v29i1.13573.
- Ramadhan, F. S., Nugroho, N. R. C., Pramono, M. S., & Indradaffa, G. A. (2024). Sejarah Pendidikan Indonesia Masa Orde Baru: Menguak Keberhasilan dan Kegagalan Kebijakan Pemerintah Orde Baru dalam Bidang Pendidikan. *Chronologia: Journal of History Education*, 6(1), 44-55. <http://dx.doi.org/10.22236/jhe.v6i1.11920>.
- Salim, A., Manubey, J., & Kuswandi, D. (2024). Neoliberalisme dan Dampaknya bagi Pendidikan Indonesia: Sebuah Refleksi. *Jurnal Pendidikan*, 24(2), 97-115. <https://doi.org/10.52850/jpn.v24i2.12484>.
- Sari, K. A., Fajriani, S. W., Gunawan, G., Zulqoifah, A., & Hartani, M. (2025). The Commodification of Education and Inequality in Indonesia: A Sociological Perspective. *Priviet Social Sciences Journal*, 5(8), 349-362. <https://doi.org/10.55942/pssj.v5i8.623>.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41-53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.
- Sugiyono, S. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suparyati, A., & Habsya, C. (2024). Kompetensi lulusan pendidikan vokasi untuk bersaing di pasar global. *JiIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1921-1927. <https://www.jiip.stkipyapisdompnu.ac.id/jiip/index.php/JiIP/article/view/3288>.
- Syadiyah, D. N. F. (2024). Integration of Soeharto's Leadership Values in History Lessons on Indonesia's New Order Era in Three Senior High Schools in Cirebon, West Java. *Indonesian Journal of History Education*, 9(2), 41-64. <https://doi.org/10.15294/ijhe.v9.i2.5854>.
- Syafii, A. (2018). Ideologi Pendidikan dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi Mengacu KKNI dan SNPT Berparadigma Integrasi-Interkoneksi. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 15(2), 146-159. <https://doi.org/10.14421/jpai.2018.152-04>.
- Syahputra, M. A. D., Sariyatun, S., & Ardianto, D. T. (2021). Peranan Penting Sejarah Lokal sebagai Objek Pembelajaran untuk Membangun Kesadaran Sejarah Siswa. *HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 4(1), 85-94. <https://doi.org/10.17509/historia.v4i1.27035>.
- Utami, S. F. D., Aryadi, M. R. N., & Almauqy, M. F. F. (2024). Transformasi dan Pengaruh Kebijakan Pendidikan Pada Masa Orde Baru di Indonesia.

DEWARUCI: Jurnal Studi Sejarah dan Pengajarannya, 3(1), 1-8.
<https://jurnal.anfa.co.id/index.php/dewaruci/article/view/2059>.